

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH PLASTIK DIKAITKAN DENGAN KONSISTENSI PERATURAN DAERAH TERHADAP UNDANG – UNDANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**Sherly Hermawati**

**1687068**

Undang-Undang Pengelolaan Sampah memberikan kewenangan masing-masing kepada Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah plastik di Indonesia. Sinergi antara keduanya perlu dilakukan. Namun demikian terdapat isu hukum bahwa Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang bersifat melarang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah plastik di Indonesia serta konsistensi peraturan daerah mengenai larangan penggunaan plastik di beberapa daerah terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Penelitian hukum yuridis normatif ini dilakukan dengan tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan undang-undang, dan konseptual. Data yang digunakan antara lain adalah data primer, sekunder dan tersier. Serta pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Pengolahan data ini diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini, telah diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Pemerintah Pusat juga perlu memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan Peraturan daerah oleh Pemerintah Daerah, agar masyarakat dapat memahami bahwa Peraturan daerah yang dibuat pada prinsipnya sudah diketahui dan dipahami isinya oleh pemerintah pusat, sehingga mengurangi adanya penolakan dari masyarakat yang menganggap Peraturan daerah bertentangan dengan Undang-undang Pengelolaan Sampah, sekaligus menunjukkan adanya konsistensi antara perda dengan Undang-undang Pengelolaan sampah.

**Kata Kunci : Undang-Undang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah, Sampah Plastik, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah.**

## **ABSTRACT**

### **LOCAL GOVERNMENT'S RESPONSIBILITY IN THE REDUCTION AND HANDLING OF PLASTIC WASTE IS ASSOCIATED WITH CONSISTENCY OF REGIONAL REGULATION ON WASTE MANAGEMENT LEGISLATION**

**Sherly Hermawati**  
**1687068**

The Waste Management Act provides its respective authority to the central and local governments in order to reduce and handle plastic waste in Indonesia. Synergy between the two needs to be done. Nevertheless there is a legal issue that the local regulation issued by the Government that is prohibited in accordance with the mandate of law. This research is conducted with the aim to know the responsibility of local governments in the reduction and handling of plastic waste in Indonesia as well as the consistency of local regulations on the prohibition of the use of plastics in some areas of law No. 18 of 2008 on waste management.

This normative juridical law study was conducted with the type of analytical descriptive research through a legal, and conceptual approach. The data used are primary, secondary and tertiary data. And data collection is done by literature study. This data processing is processed and analyzed qualitatively.

Based on this research, it is known that the implementation of waste management is necessary for legal certainty, the clarity of responsibility and authority of the government, local governments, and the role of the community and the business world so that waste management can run proportionally, effectively, and efficiently. The central government also needs to provide clarity on the implementation of local regulations by local governments, so that people can understand that the local regulations made in principle are known and understood by the central government, thus reducing the rejection of the community that considers the regional regulations contrary to the Garbage Management Act, as well as demonstrating the consistency between the waste management law.

**Keywords: waste management law, local regulation, plastic waste, local government responsibilities.**

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
LEMBAR PENGESAHAN.....	xiii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	xiv
PERSETUJUAN REVISI TUGAS AKHIR.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
1. Kerangka Teoritis.....	9
2. Kerangka Konseptual.....	13
F. Metode Penelitian.....	14

1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Jenis Data.....	16
5. Teknik Pengumpulan.....	17
6. Teknik Analisis Data.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II : .....	21
TINJAUAN UMUM TERKAIT PENGELOLAAN SAMPAH.....	21
A. Pengaturan Terkait Pengelompokan Sampah.....	21
B. Sistem Pengelolaan Sampah Di Indonesia.....	23
C. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Lingkungan.....	29
D. Aspek Perizinan Terkait Pengelolaan Sampah.....	31
BAB III : .....	38
HIERARKI PERUNDAN-UNDANGAN DAN HUBUNGAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....	38
A. Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia.....	38
B. Hubungan Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Pusat Dikaitkan Dengan Otonomi Daerah.....	50

BAB IV :	58
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH PLASTIK DI INDONESIA DAN KONSISTENSI PERATURAN DAERAH MENGENAI LARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI BEBERAPA DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.....	58
A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengurangan Dan Penanganan Sampah Plastik Di Indonesia.....	58
B. Konsistensi Peraturan Daerah Mengenai Larangan Penggunaan Plastik Di Beberapa Daerah Terhadap Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.....	74
BAB V : PENUTUP.....	90
A. Simpulan.....	90
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	xiii
LAMPIRAN.....	xiii
CURRICULUM VITAE.....	xiii
DAFTAR BIMBINGAN.....	xiv
MATRIKS.....	xv